



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.8.6.2/ 87 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN UNIT KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Pasal Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan Dan Evaluasi Zona Integritas 2023 pada Huruf E angka 3 poin c, diamanatkan bahwa penetapan predikat unit/satuan kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi Hasil Evaluasi Zona Integritas Mandiri ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada road map reformasi birokrasi 2020-2024 terutama terkait birokrasi yang bersih, akuntabel, pelayanan publik yang prima dan berdasarkan Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2025 Nomor B/23/PW.04/2025 Tanggal 19 Desember 2025 dari Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dipandang perlu Menetapkan Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas;
- 6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
- 7. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 30 Tahun 2024 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2026 sebagaimana Nama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terpilih tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG ORGANISASI	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 18 februari 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.8.6.2/87 TAHUN 2026
TANGGAL 18 FEBRUARI 2026

NAMA-NAMA UNIT KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2026

NO	NAMA SKPK	KET
1	2	3
1	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen	Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen	Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
3	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Juang	Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
4	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kuala	Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG ORGANISASI	
KABAG HUKUM	

4

BUPATI BIREUEN,
MUKHLIS